

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB
KONVERGENSI IFRS PADA LAPORAN LABA RUGI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:
REDITA SISILYANI
NIM. 12030111130048

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Redita Sisiliyani
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 13 Desember 2018
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si.Akt.
NIP. 1966 0108 199202 1001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redita Sisiliyani
NIM : 12030111130048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini atas hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan atau bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, 13 Desember 2018

Redita Sisiliyani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- * *Tuhan merupakan sumber kekuatanku yang utama dan tetap jaga semangat merupakan spiritku*
- * *Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa. Tanpa raga, jiwa hanya udara hampa dan tanpa jiwa, raga adalah kerangka tanpa makna (Kahlil Gibran).*

Kupersembahkan kepada:

- ◆ *Bapak, Ibuku, Kakak Anita, Kakak Atika*
- ◆ *Orang-orang yang saya cintai dan sayangi*

ABSTRACT

This research aims to analyze the Effect of Corporate Governance Structure on Compliance Levels of Mandatory Disclosure of IFRS Convergence in Income Statements. The unit of analysis in this research are service companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013, 2014 and 2015. Through the observation it is known that the total number of units of analysis or population is as much as 120 units of research samples taken from the population by purposive sampling.

Based on the results of data analysis that has been done, it can be conveyed several research findings that: 1) variable number of board of commissioner members has a significant positive effect on the probability of the level of company compliance in mandatory disclosure of IFRS convergence; 2) the variable proportion of independent commissioners does not affect the level of company compliance in mandatory disclosure of IFRS convergence; 3) variable number of audit committee members has a significant positive effect on the probability of the level of company compliance in mandatory disclosure of IFRS convergence; 4) variable number of audit committee meetings does not affect the level of company compliance in mandatory disclosure of IFRS convergence; 5) variable number of board of commissioner meetings has a significant positive effect on the probability of the level of company compliance in mandatory disclosure of IFRS convergence.

While the recommendations that can be given are; 1) in the next research that will be carried out, it is expected to be able to increase the number of samples of the company which restatements the income statement; 2) in the next research to be expected to be able to add the type of sample company to be studied not only service companies; and 3) in the next research to be expected to identify and present other variables that can influence the level of compliance with the disclosure of the mandatory disclosure of IFRS convergence.

Keywords: *Structure of Corporate Governance and Compliance Level of Mandatory Disclosure of IFRS Convergence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Melalui observasi diketahui jumlah keseluruhan dari unit analisis atau populasi sebanyak Sampel penelitian sebanyak 120 unit yang diambil dari populasi secara *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disampaikan beberapa temuan penelitian bahwa: 1) variabel jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas tingkat kepatuhan perusahaan dalam pengungkapan wajib konvergensi IFRS; 2) variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dalam pengungkapan wajib konvergensi IFRS; 3) variabel jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas tingkat kepatuhan perusahaan dalam pengungkapan wajib konvergensi IFRS; 4) variabel jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dalam pengungkapan wajib konvergensi IFRS; 5) variabel jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas tingkat kepatuhan perusahaan dalam pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Sedangkan rekomendasi yang mampu diberikan adalah; 1) dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel perusahaan yang melakukan penyajian kembali laporan laba rugi; 2) dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah jenis perusahaan sampel yang akan diteliti tidak hanya perusahaan jasa saja; dan 3) dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya diharapkan mengidentifikasi dan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS.

Kata Kunci: *Struktur Corporate Governance dan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang diberi judul “Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penelitian ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, kritik dan saran. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Fuad, S.ET, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Akuntansi yang selalu memberikan motivasi.
3. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si.Akt. Selaku dosen pembimbing yang sudah disiplin, sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing saya dalam menyusun skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Adityawarman, S.E., M.acc., Ak. Selaku dosen wali yang sudah memberikan nasehat.
5. Seluruh dosen dan segenap staf Fakultas Ekonomika atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama menempuh ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Orang tua tercinta, Bapak Subandriyo dan Ibu Setyowati yang selalu sabar menghadapi saya dan memberikan support, nasehat, kasih sayangnya dan doa selama menjalankan kuliah di Universitas Diponegoro.

7. Kakak saya tercinta Anita dan Atika atas dukungan yang telah diberikan untuk menjalankan masa kuliah di Universitas Diponegoro.
8. Suami saya Wahyu Septya atas kesabaran, dukungan, perhatian, dan semangatnya selama ini kepada saya.
9. Mertua saya mamah Ratna Wahyu Setyaningtyas dan papah Agus atas dukungan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dan dorongan semangat dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 13 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	13
2.1.2 Pengungkapan Wajib (<i>Mandatory Disclosure</i>) Konvergensi IFRS	14
2.1.3 Struktur <i>Corporate Governance</i>	16
2.1.4 Dewan Komisaris	20
2.1.5 Proporsi Komisaris Independen	21
2.1.6 Jumlah Anggota Komite Audit.....	21
2.1.7 Jumlah Rapat Komite Audit.....	23
2.1.8 Jumlah Rapat Dewan Komisaris	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	30
2.4 Perumusan Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Desain Penelitian	38
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	38
3.3 Populasi dan Sampel.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.5 Metode Pengumpulan Data	43
3.6 Metode Analisis Data	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	47
4.2 Analisis Data.....	48

	4.2.1 Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	49
	4.2.2 <i>Overall fit test</i>	50
	4.2.3 Model Persamaan	51
	4.2.4 Pengujian Pengaruh secara Parsial	53
	4.3 Pembahasan	58
BAB V	PENUTUP	72
	5.1 Kesimpulan	72
	5.2 Keterbatasan Penelitian	73
	5.3 Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	76
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 <i>Research Gap</i>	27
Tabel 4.1 Spesifikasi Sampel.....	47
Tabel 4.2 <i>Hosmer Lameshow test</i>	49
Tabel 4.3 Omnibus test of model coefficient – model 1	50
Tabel 4.4 Nilai R ²	50
Tabel 4.5 Hasil uji Regresi Logistik.....	51
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur <i>Two Tiers System</i> yang diterapkan di Indonesia	20
Gambar 2.2. Skema Kerangka Pemikiran	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Induk Penelitian
- Lampiran 2 Output Perhitungan SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia standar akuntansi keuangan berbasis IFRS mulai diterapkan sejak tahun 2012. Sebelum tahun 2012 penerapan dini standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS dianjurkan bagi perusahaan yang mau menerapkan. Oleh karena itu, sebelum tahun 2012 bagi perusahaan yang telah mampu menerapkan IFRS diperbolehkan untuk menggunakan standar akuntansi internasional tersebut.

Standar akuntansi internasional telah mengatur pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Sebagai contoh yaitu perusahaan emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan perusahaan BUMN. Menurut Gamayuni (2009), semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012.

Perusahaan yang menerapkan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS maka diwajibkan untuk melakukan pengungkapan penuh (*Full Disclosure*). Pengungkapan dilakukan dengan membuat laporan keuangan atau laporan tahunan (*Annual Report*). Pengungkapan dalam *annual report* merupakan salah satu isu penting di dunia pasar modal. *Annual report* merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan

keputusan ekonomi terutama oleh pemegang saham dan investor untuk menentukan tujuan investasi mereka (Belkaoui, 2000).

Semakin meningkatnya tingkat kepatuhan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh manfaat yang positif. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Choi dan Mueller (1997) bahwa:

Meningkatnya pengungkapan dalam perusahaan akan meningkatkan distribusi probabilitas subyektif dari hasil yang diharapkan suatu sekuritas di mata para investor dengan mengurangi ketidakpastian (resiko) yang berhubungan dengan aliran pengembalian tersebut. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja di atas rata-rata industri, pengungkapan yang lebih baik cenderung meningkatkan kepentingan relatif yang ditempatkan para investor pada data-data perusahaan tersebut.

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*), dan yang paling umum digunakan dari ketiga konsep di atas adalah pengungkapan yang cukup.

Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih bersifat positif, pengungkapan yang wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Terlalu banyak informasi yang disajikan akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh karena itu, pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para investor dan pihak lainnya, hendaknya bersifat cukup, wajar dan lengkap.

Laporan keuangan perusahaan ditujukan kepada pemegang saham, investor dan kreditor. Lebih jelasnya FASB (1980) dalam SFAC No.1 menyatakan:

Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditor dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit dan keputusan sejenis lainnya.

Di samping ketiga pihak di atas, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah dan masyarakat umum, tetapi kesemuanya ini dipandang sebagai penerima kedua dari laporan keuangan tahunan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan. Adapun yang menjadi titik berat pengungkapan adalah investor adalah kurangnya pengetahuan akan keputusan yang akan diambil oleh pihak lain dan di luar investor. Pengambilan keputusan yang dilakukan investor dan kreditor dapat diketahui secara jelas dan teridentifikasi dengan baik. Bagi investor keputusan yang diinginkan adalah membeli – menjual – mempertahankan

saham dan keputusan kreditur adalah berkaitan dengan pemberian kredit atau perpanjangan kredit kepada perusahaan. Tujuan pelaporan keuangan kepada kedua pemakai ini relatif jelas. Sedangkan tujuan pelaporan kepada pegawai, konsumen dan masyarakat umum sulit dirumuskan, sehingga dianggap bahwa informasi yang berguna bagi investor dan kreditur juga berguna bagi pihak lain.

PSAK Nomor 01 Tahun 2002 menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi:

1. Investor, yang berkepentingan dengan risiko dan hasil dari investasi yang mereka lakukan, dan yang biasa dilihat oleh investor adalah informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar deviden.
2. Kreditur, yang menggunakan informasi akuntansi untuk membantu mereka memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada waktu jatuh tempo.
3. Pemasok, yang membutuhkan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo .
4. Karyawan, yang membutuhkan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, dan kemampuan memberi pensiun dan kesempatan kerja.
5. Pelanggan, yang berkepentingan dengan informasi tentang kelangsungan hidup perusahaan terutama bagi mereka yang memiliki perjanjian jangka panjang dengan perusahaan .
6. Pemerintah, yang berkepentingan dengan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan, dan untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan lain-lain.
7. Masyarakat, yang berkepentingan dengan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir perusahaan serta berbagai aktivitas yang menyertainya.

Masalah yang berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang perlu disajikan dalam laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tujuan keuangan. Dalam SFAC Nomor 01 Tahun 1980 disebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan (*financial reporting*) tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan (*financial statement*). Dengan kata lain, cakupan pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan laporan keuangan. FASB menyebutkan:

Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain.

Pengungkapan melibatkan keseluruhan proses pelaporan. Namun demikian ada beberapa metode yang berbeda-beda dalam mengungkapkan informasi yang dianggap penting. Pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan ini pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi yang bersangkutan dan kepentingan relatifnya. Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bentuk dan susunan laporan yang formal
2. Terminologi dan penyajian yang terinci
3. Informasi sisipan
4. Catatan kaki
5. Ikhtisar tambahan dan skedul-skedul
6. Komentar dalam laporan auditor
7. Pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris

Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No. 01. Selain itu pemerintah melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996 juga mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pengungkapan informasi yang diatur oleh Pemerintah ataupun lembaga profesional (IAI) merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang telah publik. Tujuan pemerintah mengatur pengungkapan informasi adalah untuk melindungi kepentingan para investor dari ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan investor karena adanya kepentingan manajemen.

Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009), terdapat 2 (dua) sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham, atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan (Adina dan Ion, 2008).

Mandatory disclosure bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al-Akra et al., 2010).

Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan harus dilakukan oleh suatu perusahaan karena struktur *corporate governance* di setiap negara berbeda-beda. Menurut Hertanti dalam Nafisah (2011), arah perubahan sosial masyarakat Indonesia yang menuntut diterapkannya prinsip *corporate governance* bagi para

pebisnis membuat isu pengungkapan semakin relevan untuk dikaji karena nilai keutamaan yang ada dalam *corporate governance* adalah *transparency*, *responsibility*, *fairness* dan *accountability*.

Corporate governance menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 2009). Menurut Nofianti (2009), *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian Utami, dkk (2012) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib IFRS sebesar 72,203%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS di Indonesia masih kurang, mengingat perusahaan harus mengungkapkan 100 persen untuk pengungkapan wajib. Utami, dkk (2012) juga memperlihatkan bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sehingga hipotesis pertama dan kedua diterima. Variabel lainnya yaitu jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, leverage, profitabilitas dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Selain penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS di Indonesia, di luar negeri sudah banyak yang melakukan penelitian tersebut. Al-

Akra et al. (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan akibat privatisasi pada kepatuhan pengungkapan wajib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi pengungkapan menghasilkan pengaruh yang paling signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Selain itu penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi pemerintahan melalui mandat komite audit muncul sebagai penentu yang signifikan dari kepatuhan terhadap persyaratan pengungkapan wajib. Pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Akra et al. (2010) variabel struktur *corporate governance* yang digunakan hanya terbatas pada ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan komite audit.

Zhang, et.all (2007) secara tidak langsung memperlihatkan adanya hubungan antara kualitas komite audit, independensi auditor, dan kelemahan pengendalian internal, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Perusahaan lebih mungkin untuk diidentifikasi dengan kelemahan pengendalian internal, jika komite audit memiliki keahlian keuangan yang kurang. Mereka juga lebih mungkin untuk diidentifikasi dengan kelemahan pengendalian internal, jika auditor mereka lebih mandiri. Selain itu, perusahaan dengan perubahan auditor baru-baru ini lebih cenderung memiliki kelemahan pengendalian internal.

Di Indonesia penelitian dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) yang meneliti tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) di perusahaan jasa, serta pengaruh dari struktur *corporate governance* (CG) dengan tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Variabel struktur tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kepatuhan adalah proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai hubungan struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Struktur *corporate governance* merupakan suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan (Prawinandi et al., 2012). Inti *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris (FCGI, 2001). Oleh karena itu, struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris serta komite audit yang merupakan suatu komite di bawah dewan komisaris.

Penelitian Al-Akra et al. (2010) telah meneliti tentang pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan, akibat privatisasi, pada kepatuhan pengungkapan wajib dari sampel 80 perusahaan nonkeuangan. Namun, terdapat kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh Al-Akra et al. (2010), yaitu terkait hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasikan untuk pasar lain di luar negara Yordania. Hal ini dikarenakan pada penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) masih didasarkan pada pasar geografis tunggal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Al-Akra et al. (2010) adalah perbedaan lokasi dan sampel. Penelitian Al-

Akra et al. (2010) menggunakan lokasi pada negara Yordania dengan menggunakan perusahaan non-keuangan sebagai sampel penelitian. Sementara penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan jasa yang telah *go public* di Indonesia. Objek penelitian ini adalah laporan tahunan terutama berfokus pada laporan laba rugi perusahaan. Penelitian ini berfokus pada laporan laba rugi karena laporan laba rugi merupakan laporan yang selalu diperhatikan oleh *stakeholders* dalam *annual report* sebagai pedoman mereka dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan laba rugi juga menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas yang memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib di Indonesia yang masih rendah atau belum sesuai standar akuntansi keuangan berbasis IFRS, menarik minat peneliti untuk mengkajinya secara ilmiah, sehingga melalui penelitian nantinya dapat memberikan bukti empiris bagaimana struktur *corporate governance* perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan wajib konvergensi IFRS dan struktur *corporate governance*. Struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, dan jumlah rapat dewan komisaris.

1.2 Rumusan Masalah

Semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk

penyusunan laporan keuangan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009). Permasalahan akan muncul apabila suatu perusahaan belum mampu menerapkan standar akuntansi keuangan yang konvergen dengan IFRS.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian, yang diajukan adalah

1. Apakah variabel jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS?.
2. Apakah variabel proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS?.
3. Apakah variabel jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS?.
4. Apakah variabel jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS?.
5. Apakah variabel jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan jasa yang telah *go public*, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi manajemen mengenai mekanisme *corporate governance* kaitannya dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan tahunan kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.
3. Bagi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait, penelitian dapat digunakan sebagai pendorong untuk menetapkan kebijakan ataupun standar pengungkapan wajib yang lebih baik.
4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.